

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan perekonomian di Indonesia yang semakin maju, menyebabkan banyak bermunculan bank-bank yang menawarkan berbagai fasilitas layanan seperti menerima simpanan, menerima pembayaran setoran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya.

Dalam perbankan ada berbagai macam bentuk usaha bank dan termasuk di dalamnya usaha memberikan kredit. Kegiatan perkreditan merupakan proses pembentukan aset bank sehingga kredit merupakan aset bank yang memiliki risiko (*risk asset*) karena aset tersebut dikuasai oleh pihak luar yaitu debitur. Bank harus berusaha mengelola aset tersebut agar kualitas *risk asset* tersebut menjadi sehat dalam arti produktif sehingga dapat memberikan kontribusi pendapatan yang besar bagi bank.

Menurut UU No.10 tahun 1998 dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI, Revisi 2008) mendefenisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Perkreditan merupakan usaha utama perbankan (*financial depening*), dimana rata-rata jumlah harta bank di banyak negara ekonomi maju dan berkembang terikat dalam bentuk kredit. Tingginya angka kredit yang tersalurkan dari suatu bank dikarenakan dua alasan, yaitu dilihat dari sisi internal dan eksternal Bank. Dari sisi internal, permodalan

bank masih cukup kuat dan portofolio kredit meningkat, sedangkan alasan eksternal bank adalah membaiknya prospek usaha nasabah.

Dengan semakin meningkatnya penyaluran kredit, salah satu permasalahan yang sering dihadapi bank dalam hal pemberian kredit, umumnya kredit yang diberikan berakhir menjadi kredit yang bermasalah atau kredit macet atau istilah dalam perbankan disebut Non-Performing Loan (NPL). Tingginya NPL di Indonesia tidak terlepas kurang patuhnya bank-bank di Indonesia terhadap prinsip-prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Bahaya yang timbul dari kredit bermasalah adalah tidak terbayarnya kembali kredit tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya.

PT. Bank Negara Indonesia (BNI) (Persero) Tbk merupakan salah satu bank dengan tingkat penyaluran kredit yang tinggi, yang digambarkan dalam data statistik Perbankan Indonesia sebagai berikut:

Tabel 1.1
Peringkat Bank Umum dalam Penyaluran Kredit Februari 2013
Sumber: www.bi.go.id

(Miliar Rp)

Peringkat	Nama Bank	Kredit yang Disalurkan	Pangsa Terhadap Total Kredit Bank Umum (%)
1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	154,697	7.02
2	PT BRI (Persero) Tbk.	123,583	5.61
3	PT BCA, Tbk.	86,908	3.94
4	PT BNI (Persero),Tbk	69,721	3.16
5	PT Bank CIMB Niaga, Tbk	69,308	3.15

Menurut Firdaus (2006:2) tingkat persaingan antar bank dan risiko perkreditan yang tinggi menyebabkan pihak manajemen bank perlu menerapkan suatu pengendalian internal yang memadai dimana pengendalian tersebut bertujuan untuk melindungi harta milik perusahaan dengan meminimumkan kemungkinan terjadinya penyelewengan, pemborosan, kemacetan kredit, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja.

Salah satu kasus yang dilansir oleh media *Pewarta Indonesia* (Senin, 04 Februari 2013, Didi Ronaldo), Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau didesak mengungkap mafia perbankan di Bank BNI 46 Cabang Pekanbaru. Nilai kredit macet itu sebesar Rp 4,9 miliar dengan agunan lahan fiktif. Desakan ini disampaikan LSM Riau Bersih dalam aksi demonya di Kejati Riau, jalan Sudirman, Pekanbaru. LSM ini menyebutkan, bahwa kasus mafia perbankan di BNI Cabang Pekanbaru sejak tahun 2009 hingga kini tidak pernah diusut.

Likuiditas keuangan, solvabilitas dan profitabilitas bank sangat dipengaruhi oleh keberhasilan bank dalam mengelola kredit yang disalurkan. Kredit bermasalah atau macet memberikan dampak yang kurang baik bagi negara, masyarakat, dan perbankan Indonesia. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menahan tersangka kasus penggelapan surat jaminan kredit, *supervisor* dan tiga pegawai PT. Bank Negara Indonesia cabang Kediri yaitu Yustarso, PHT, ABP, dan AP, mereka dalam kasus ini yang berpotensi merugikan Negara sebesar Rp. 1,8 Miliar (Tempo, Senin 06 Januari 2014 Oleh Agita Sukma)

Dengan pengendalian internal yang memadai diharapkan dapat menjamin proses pemberian kredit tersebut akan dapat terhindar dari kesalahan-kesalahan dan penyelewengan yang akan terjadi.

Menurut PBI No.5/08/PBI/2003 dalam Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Manajemen Risiko (2013), tentang Sistem Pengendalian Intern bagi Bank umum menyatakan bahwa pengendalian intern sekurang-kurangnya mencakup 5 (lima) elemen pokok, yaitu (1) pengawasan oleh manajemen dan budaya pengendalian; (2) identifikasi dan penilaian risiko; (3) kegiatan pengendalian dan penilaian fungsi; (4) sistem

akuntansi, informasi dari komunikasi; dan (5) kegiatan pemantauan dan tindakan korelasi penyimpangan.

Dalam kelangsungan aktivitas pengendalian internal, diperlukan orang-orang atau bagian yang independen di dalam entitas tersebut untuk mengawasi dan menilai keefektifan pengendalian internal. Penelitian yang dilakukan oleh R. Ait Novatiani dan Anisa Ajeng Yulyanti (2011), menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara internal audit terhadap efektivitas pengendalian internal aset tetap, agar membantu perusahaan terhindar dari kecurangan-kecurangan dan dapat mengetahui risiko-risiko yang akan dihadapi perusahaan.

Diterangkan bahwa penelitian ini ditulis atas dasar penelitian-penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian yang ditulis oleh Nisa Mustikawati (2013, Universitas Brawijaya Malang), yang berjudul **“Penerapan manajemen risiko untuk meminimalisir risiko kredit macet”** dengan objeknya yaitu PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Kediri. Dalam penelitian ini menjelaskan untuk meminimalisir risiko kredit macet, dibutuhkan penerapan manajemen risiko perbankan agar dapat meningkatkan kualitas penyaluran kredit. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Riska S. Papalaugi (2013, Universitas Sam Ratulangi Manado), dengan judul **“Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dalam menunjang efektivitas pemberian kredit UKM pada PT. BRI (Persero) Tbk Manado”**, menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal perlu diterapkan untuk mencegah adanya penyalahgunaan wewenang serta dapat mendorong tercapainya pemberian kredit yang efektif. Dalam penulisan ini penulis bermaksud melanjutkan penelitian sebelumnya, perbedaan pada penelitian kali ini penulis mengaitkan pada hubungan dari auditor internal sebagai bagian

independen di dalam perusahaan dan manajemen risiko perbankan sebagai pengendalian internal dalam menjalankan pemberian kredit di perusahaan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Auditor Internal dan Penerapan Manajemen Risiko Perbankan Terhadap Pemberian Kredit**” (Studi Kasus pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Bandung)

1.2 Identifikasi Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis merumuskan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana auditor internal, manajemen risiko perbankan dan pemberian kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Bandung.
2. Apakah auditor internal dan manajemen risiko perbankan berpengaruh secara simultan terhadap pemberian kredit.
3. Apakah auditor internal dan manajemen risiko perbankan berpengaruh secara parsial terhadap pemberian kredit.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang mendukung mengenai penerapan manajemen risiko perbankan dan auditor internal di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam pemberian kredit.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui auditor internal, manajemen risiko perbankan dan pemberian kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Bandung.
2. Untuk mengetahui pengaruh simultan pada auditor internal, manajemen risiko perbankan pada pemberian kredit.
3. Untuk mengetahui pengaruh parsial mengenai auditor internal, manajemen risiko perbankan, dan pemberian kredit.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dari penulisan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis untuk menambah pengetahuan terkait dengan penerapan manajemen risiko perbankan dan auditor internal yang dilakukan dalam rangka kebijakan pemberian kredit.

2. Bagi Pembaca

Penulisan penelitian ini berguna bagi pembaca untuk menambah pengetahuan terkait dengan penerapan manajemen risiko perbankan dan auditor internal di PT.

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam kebijakan pemberian kredit

3. Bagi Akademisi

Selain sebagai bahan pelajaran bagi akademisi, penelitian ini diharapkan juga dapat digunakan dan dipelajari oleh para praktisis terutama praktisi Dewan

direksi, manajemen, auditor internal dan staff lainnya dalam menjalankan kebijakan pemberian kredit.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Pelaksanaan Penelitian ini dilaksanakan pada:

Waktu : 26 Mei 2014

Tempat : PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Jl. Babakan No.2 Majalaya 40382

